

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

# Pendapatan Pajak Berkurang Akibat Corona

## Pemerintah DKI Jakarta mendapat pinjaman Rp 12,5 triliun dari rprogram pemulihan ekonomi nasional.

**Gangsar Parikesit**

*gangsar@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengusulkan perubahan target pajak pada tahun ini, dari Rp 50,1 triliun menjadi Rp 28,185 triliun. Revisi target pajak itu diperlukan karena sejumlah sektor usaha terpuak akibat wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). "Misalnya, restoran kini hanya boleh menerima tamu 50 persen dari kapasitas yang ada, dan itu otomatis mengurangi pendapatan mereka," ujar Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Jakarta Yuspin Dramatin, kemarin.

Lesunya pemasukan dari pajak ini terlihat dari rendahnya realisasi pajak. Hingga kemarin, Badan Pendapatan DKI Jakarta baru bisa mengumpulkan pajak sebesar Rp 12,956 triliun. Padahal target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mencapai Rp 50,1 triliun.

Yuspin menjelaskan, saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, restoran sudah bisa menerima pengunjung untuk makan di tempat, tapi jam operasional tetap dibatasi. Akibatnya, pendapatan pengusaha restoran berkurang sehingga pajak yang disetorkan juga bakal berkurang.

Data Badan Pendapatan DKI menyebutkan target pajak restoran tahun ini ialah Rp 4,25 triliun. Namun, Badan Pendapatan mengusulkan perubahan target pajak menjadi Rp 2,3 triliun.

Yuspin menuturkan salah satu target pajak yang direvisi ialah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dari Rp 10,6 triliun menjadi Rp 2,9 triliun. Menurut dia, dalam kondisi saat ini, hanya sedikit masyarakat yang membeli tanah dan bangunan. "Saat ini, prioritas masyarakat pasti untuk mencukupi kebutuhan pokok," katanya.

Yuspin mengungkapkan bahwa program insentif pajak yang diluncurkan pemerintah DKI pada 3 April sampai 29 Mei lalu tidak signifikan menambah pen-

dapatan pajak. Sebab, tidak semua masyarakat berminat mengikuti program keringanan pajak itu dengan alasan tidak memiliki dana yang mencukupi.

Sebelumnya, pemerintah DKI meluncurkan tiga program insentif pajak untuk mengurangi beban warga akibat pandemi Covid-19. Pertama, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah akibat pelanggaran administrasi perpajakan yang meliputi keterlambatan pembayaran pokok pajak, pelaporan pajak, dan denda.

Kedua, pengurangan pokok pajak daerah, khususnya bagi pelaku usaha yang terkena dampak penerapan PSBB. Pengurangan itu berlaku untuk pelbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Adapun keringanan ketiga ialah tidak naiknya PBB tahun ini.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak menurun karena sejumlah

program di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mengalami penyesuaian atau penundaan. Namun, pemerintah DKI akan tetap melaksanakan program prioritas, seperti penanggulangan banjir, pendidikan, dan penanganan wabah Covid-19.

Program lainnya yang akan dilanjutkan, kata Riza, ialah bantuan sosial dan belanja rutin pegawai. "Sekalipun ada koreksi (perubahan anggaran belanja), kami terus melakukan berbagai upaya terkait dengan pembangunan Jakarta," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Kemarin, pemerintah DKI Jakarta mendapat pinjaman pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero). Riza mengatakan pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai program prioritas yang tertunda karena berkurangnya APBD dari Rp 87 triliun menjadi Rp 47 triliun. "Lewat bantuan SMI, kami dapat berfokus pada program yang tertunda, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ujarnya.

● GANGSAR PARIKESIT